

Presiden Jokowi Targetkan IKN Rampung 15-20 Tahun Lagi

JAKARTA (IM) - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memprediksi pembangunan ibu kota Nusantara (IKN) akan rampung sekitar 15 sampai 20 tahun mendatang. Menurutnya pembangunan IKN merupakan pekerjaan yang tidak mudah dan cukup rumit.

"Ini kan sebuah pekerjaan yang raksasa besarnya ini pekerjaan yang besar sekali dan juga bukan pekerjaan yang mudah ini pekerjaan yang rumit. Oleh sebab itu memang butuh waktu yang panjang perkiraan kita antara 15 sampai 20 tahun baru bisa diselesaikan," ujar Jokowi dalam keterangannya dikutip dari YouTube Sekretariat Presiden, Selasa (15/3).

Jokowi pun berharap dengan terpilihnya Bambang Susantono sebagai Kepala Otorita dan Dhony Rahajoe sebagai Wakil Kepala Otorita dapat melakukan tugasnya secara cepat untuk ikut serta

membangun IKN.

"Dan kita harapkan dengan sudah terbentuknya otorita ada kepala otorita dan wakil kepala otorita nanti yang menyiapkan kelembagaan sudah ada. Nanti perencanaan yang lebih detail entah itu ide dan lain-lain juga disiapkan sehingga akan semakin kelihatan. Tapi yang paling penting memang Infrastruktur dasar itu yang harus segera dimulai," katanya.

Sebelumnya, Jokowi menyebut bahwa pemindahan ibu kota negara merupakan upaya pemerintah untuk meratakan pembangunan. Hal tersebut juga dilakukan untuk mengurangi kepadatan penduduk di pulau Jawa.

"Yang paling penting adalah perpindahan ini untuk pemerataan, untuk keadilan karena kita memiliki 17 ribu pulau yang 56 persennya ada di Jawa, 156 juta populasi Indonesia ada di Pulau Jawa, padahal kita punya 17 ribu pulau," ungkapnya. ● han

KSAD Beri Penghargaan kepada 5 Prajurit TNI AD

JAKARTA (IM) - Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Dukung Abdurachman memberi penghargaan kepada lima orang prajurit berprestasi. Penghargaan itu diberikan saat Dukung melakukan kunjungan kerja ke Makodam Jaya, Cililitan, Jakarta Timur, Senin (14/3).

Penghargaan kepada prajurit berprestasi diberikan kepada empat orang yang telah meraih medali emas di bidang olahraga, yakni Sertu Wira Sukmana (menembak pistol), Serda (K) Wintang Diah KS (bola voli), Serda Irfan Arsal (karate) dan Pratu Susanto Leko (lari estafet). Sedangkan untuk Pelda Jaelani, mendapatkan penghargaan karena berhasil menangkap pelaku penusukan terhadap warga di Jakarta.

Jenderal Dukung berharap melalui pemberian penghargaan ini dapat meningkatkan semangat dan motivasi prajurit dalam bertugas serta meningkatkan kepedulian dalam membantu masyarakat.

"Melalui apresiasi ini dapat menambah semangat untuk meningkatkan prestasi dan dedikasi para prajurit. Hal baik yang telah kalian tunjukkan patut diteladani oleh prajurit TNI yang lainnya, terutama yang terkait kepedulian dalam membantu masyarakat," jelas Dukung di lokasi.

Selain itu, Jenderal Dukung berkesempatan memberika santunan kepada warakawuri dan masyarakat terdampak Covid-19. Dia berharap bantuan tersebut dapat meringankan beban ekonomi. ● mei



DISKUSI WACANA PENUNDAAN PEMILU
Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid (kedua kiri) berbincang dengan Anggota DPR fraksi PDI Perjuangan Masintan Pasaribu (kiri), Pengamat Politik Muhammad Qodari (kedua kanan), Pengamat Politik Ujang Komarudin (kanan) sebelum diskusi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (15/3). Diskusi tersebut mengangkat tema "Wacana Penundaan Pemilu dalam Koridor Konstitusi".

Bupati Banjarnegara Nonaktif Kembali Dijadikan Tersangka untuk Kasus TPPU

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali menetapkan Bupati Banjarnegara nonaktif, Budhi Sarwono (BS), sebagai tersangka. Kali ini, ia ditetapkan sebagai tersangka Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) setelah ditemukan bukti permulaan yang cukup.

"Dengan ditemukannya berbagai alat bukti baru dalam perkara dengan tersangka BS dkk, tim penyidik membuka dan memulai penyidikan terkait adanya dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang dilakukan oleh tersangka BS dkk," kata Plt Juru Bicara KPK, Ali Fikri melalui pesan singkatnya, Selasa (15/3).

Dalam perkara ini, Budhi Sarwono diduga menyembunyikan atau menyamarkan uang hasil dugaan korupsi terkait proyek pengadaan barang dan jasa di Banjarnegara ke sejumlah aset agar tidak terdeteksi oleh aparat penegak hukum. "Diduga ada upaya maupun tindakan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal usul harta kekayaan yang bersumber dari tindak pidana korupsi diantaranya dengan membelanjakan dalam bentuk berbagai aset baik bergerak maupun tidak bergerak," kata Ali.

"Proses penyidikan saat ini sedang berjalan dengan menjadwalkan pemanggilan saksi-saksi untuk menguraikan dugaan tindak pidana

dimaksud," ujar Ali menambahkan. Sebelumnya, KPK telah lebih dulu menetapkan Budhi Sarwono sebagai tersangka kasus dugaan korupsi terkait pemborongan, pengadaan atau persewaan pada Dinas PUPR Pemkab Banjarnegara Tahun 2017-2018 dan sejumlah penerimaan gratifikasi. Ia ditetapkan sebagai tersangka bersama dengan orang kepercayaan, Kedy Afandi (KA).

Dalam perkara korupsi ini, Budhi diduga memerintahkan Kedy untuk mengatur proyek pekerjaan infrastruktur di Banjarnegara. Budhi juga diduga mengarahkan Kedy untuk menetapkan adanya komitmen fee terhadap para pengusaha yang ingin menggarap proyek infrastruktur di Banjarnegara.

Tak hanya itu, Budhi juga diduga berperan aktif dengan ikut langsung dalam pelaksanaan pelelangan pekerjaan infrastruktur. Di antaranya, membagi paket pekerjaan di Dinas PUPR dengan mengikutsertakan perusahaan milik keluarganya, dan mengatur pemenang lelang.

Salah satu perusahaan milik keluarga Budhi yang ikut dalam proyek infrastruktur di Banjarnegara yakni PT Bumi Redjo. Budhi diduga telah menerima komitmen fee atas berbagai pekerjaan proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara, sekitar sejumlah Rp2,1 miliar. ● han

2 Polhukam

FOTO/ANT



AHY: Rencana Menunda Pemilu adalah Permufakatan Jahat Langgengkan Kekuasaan

Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti mempertanyakan klaim sejumlah elit yang menyebutkan rakyat ingin Pemilu 2024 ditunda. Ia yakin, tidak ada rakyat yang tiba-tiba ingin Pemilu 2024 ditunda.

JAKARTA (IM) - Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan, seorang pemimpin yang lupa untuk meninggalkan jabatannya akan dikoreksi oleh rakyat sebagaimana yang terjadi di penghujung Orde Baru.

AHY mengatakan, situasi pada era Orde Baru yang menyengsarakan rakyat dan menciptakan rasa ketidakadilan pada akhirnya melahirkan kekuasaan dan gelombang perubahan dari rakyat yang susah dan tertindas.

"Ketika seorang pemimpin lupa untuk turun tahta, maka rakyat yang akan mengorek-

sinya. Ini sejarah. Kok seperti ini ada yang mau melupakan sejarah penting bangsa ini? Hati-hati, bangsa yang tidak mau belajar dari sejarahnya sendiri, akan hancur dan mundur ke belakang," kata AHY dalam siaran pers, Senin (14/3) malam.

AHY menegaskan, pembatasan masa jabatan presiden maksimal dua periode merupakan tuntutan Reformasi setelah era Orde Baru berkuasa 32 tahun lamanya dengan melanggengkan kekuasaan dan berdampak pada tumbuh suburnya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Oleh karena itu, ia memerintahkan seluruh kader De-

mokrat di DPR dan DPRD untuk tegas menolak wacana mengundur Pemilu 2024. AHY berpandangan, wacana itu merupakan permufakatan jahat untuk melanggengkan kekuasaan dengan segala cara, termasuk dengan cara mempermainkan dan mengacak-acak konstitusi.

"Kalau mereka berhasil undur pemilu, lalu apa berikutnya? Presiden tiga periode? Presiden tidak dipilih langsung oleh rakyat? Presiden seumur hidup? Sungguh malang nasib kita kalau sampai itu semua terjadi," katanya.

Selain itu, AHY juga menilai wacana memundurkan pemilu tidak didasari oleh alasan yang logis dan masuk akal. Sebab, salah satu dalih pengunduran pemilu adalah biayanya yang tinggi mencapai Rp 86 triliun, tetapi di saat yang sama pemerintah menggelontorkan dana yang jauh lebih besar untuk membiayai pembangunan ibu kota baru.

"Bagaimana mungkin agenda pembangunan yang

tiba-tiba muncul, di tengah kondisi ekonomi yang sedang tidak baik-baik saja ini, mendorong kita untuk mengubah aturan konstitusi yang notabene merupakan amanah gerakan reformasi?" kata AHY.

AHY juga mempertanyakan klaim yang menyebutkan rakyat ingin Pemilu 2024 ditunda. Ia meyakini, tidak ada rakyat yang tiba-tiba menginginkan penundaan pemilu.

"Yang jelas, suara yang kita tangkap di lapangan adalah jeritan rakyat ketika harga-harga kebutuhan pokok naik, dan terjadi kelangkaan barang di pasar," ujarnya.

Bola panas isu penundaan Pemilu 2024 hingga kini masih terus bergulir. Wacana itu tak hanya dikemukakan oleh elite partai politik, tetapi juga internal pemerintah yang tidak lain dari kalangan menteri kabinet penguasa.

Kedua pihak tersebut mengklaim bahwa mayoritas masyarakat menginginkan Pe-

milu 2024 ditunda. Klaim itu disebut-sebut mengacu pada big data. Meski begitu, hingga kini klaim tersebut masih menjadi tanda tanya.

Isu penundaan pemilu kali pertama digulirkan oleh Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar. Ia mengusulkan Pemilu 2024 ditunda setelah mengaku mendengar masukan dari para pengusaha, pemilik usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), hingga analis ekonomi.

"Dari semua (masukan) itu saya mengusulkan Pemilu 2024 ditunda satu atau dua tahun," kata Muhaimin dalam keterangan persnya, Rabu (23/2) lalu.

Luhut mengklaim adanya big data yang berisi percakapan 110 juta orang di media sosial mendukung penundaan Pemilu 2024. Baik klaim Luhut maupun Muhaimin itu pun menuai kontroversi dan dipertanyakan kebenarannya oleh banyak pihak. ● han

KPK Pernah Ajak Indra Kenz Nyanyikan Lagu Antikorupsi

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pernah mengajak Indra Kenz alias Indra Kenz berkolaborasi untuk menyanyikan lagu yang memuat pesan antikorupsi. Seperti diketahui, Indra Kenz merupakan tersangka kasus dugaan penipuan aplikasi Binomo.

Proses pembuatan lagu itu di upload di kanal Youtube Indra Kenz pada Agustus 2021 dengan judul "PROFIT DARI TRADING, BUKAN DARI KORUPSI!! INDRAKENZ ANTI KORUPSI!!".

Dalam video berdurasi 17.54 menit itu Indra memperlihatkan proses saat menggarap video clip lagu tersebut bersama Indomusikgram.

Adapun lagu itu memberi pesan mengenai pentingnya masyarakat menolak tindak pidana korupsi seperti suap, gratifikasi, pemerasan.

Video clip lagu itu juga di-upload di channel Youtube KPK RI. Sebelumnya, video berjudul "Lihat, Lawan, Laporkan" di kanal YouTube KPK RI itu sempat diprivat. Namun saat ini video itu sudah bisa ditonton kembali.

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri menjelaskan, pembuatan lagu itu merupakan bentuk kontribusi masyarakat terhadap upaya pemberantasan korupsi. KPK senantiasa memberikan kesempatan dan mengajak setiap elemen masyarakat sesuai dengan kemampuan dan perannya masing-masing untuk melibatkan diri.

"Baik melalui pendekatan pendidikan antikorupsi, pencegahan, maupun penegakan hukum dengan berani melaporkan jika mengetahui adanya dugaan tindak pidana korupsi," kata Ali ditemui di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (15/3).

Ali menuturkan, lagu yang ikut dinyanyikan oleh Indra Kenz dilakukan oleh Direktorat Peran Serta Masyarakat KPK.

KPK pun menyambut baik inisiatif pihak-pihak yang memanfaatkan kemampuannya untuk menghasilkan karya yang memuat pesan-pesan antikorupsi, untuk selanjutnya disebarluaskan kepada khalayak luas.

"Terlebih tidak ada pembiayaan dari KPK dalam penyediaan lagu ini. Sehingga murni kontribusi para pihak tersebut dalam mendukung Masyarakat tentang nilai antikorupsi," jelas Ali.

Indra Kenz sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dugaan tindak pidana judi online dan/atau penyebaran berita bohong melalui media elektronik dan/atau penipuan, perbuatan curang dan/atau tindak pidana pencucian uang (TPPU) terkait aplikasi Binomo.

Setelah Indra ditahan, penyidik langsung melakukan tracing aset Indra Kenz. Penyidik juga telah menyita sejumlah aset Indra Kenz di antaranya dua rumah di kawasan Deli Serdang dan satu rumah di kawasan Medan Timur, Sumatera Utara. Selanjutnya, penyidik juga menyita sejumlah kendaraan Indra, yakni mobil Tesla dan mobil Ferrari. ● mei

Oditur Militer Tinggi II akan Panggil Saksi Ahli di Sidang Kolonel Priyanto

JAKARTA (IM) - Oditur Militer Tinggi II Jakarta berencana memanggil ahli sebagai saksi dalam sidang perkara dugaan pembunuhan berencana dengan terdakwa Kolonel Inf Priyanto.

Oditur Militer Tinggi II Jakarta, Kolonel Sus Wirdel Boy, mengatakan, ahli yang akan dihadirkan sebagai saksi yakni dokter yang menangani autopsi jenazah Handi Saputra (17) dan Salsabila (14) untuk sebagai saksi.

"Yang melakukan visum terhadap saudara Handi Saputra selaku korban. (Dari) RSUD Margono," ujar Sus Wirdel Boy saat dikonfirmasi di Jakarta Timur, Selasa (15/3).

Kehadiran ahli tersebut, menurut Sus Wirdel Boy sangat diperlukan guna mengungkap perbuatan Kolonel Inf Priyanto yang tidak menolong Handi ketika terjadi kecelakaan di Jalan Raya Nagreg, Bandung, hingga menyebabkannya meninggal dunia lalu dibuang ke sungai Serayu Jawa Tengah.

Hasil autopsi yang tertuang dalam Visum et Repertum dari tim dokter RSUD Margono diketahui saat itu Handi masih

hidup ketika dibuang karena terdapat air dan pasir di bagian organ paru.

Lantaran dibuang dalam keadaan hidup ini perkara berubah dari kecelakaan lalu lintas menjadi pembunuhan berencana sebagaimana Pasal 340 KUHP yang didakwakan ke Priyanto.

Namun Oditur Militer Tinggi II Jakarta urung menghadirkan ahli sebagai saksi pada sidang lanjutan di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada hari ini.

"Ahli belum (dihadirkan sebagai saksi). Jadi biasanya untuk sidang perkara setelah semua saksi kita panggil baru nanti kita panggil ahli. Ahli itu biasanya pamungkas (terakhir)," ungkapnya.

Ortu Korban Bersaksi
Orangtua (ortu) korban korban tabrakan lari yang dilakukan Kolonel Priyanto di Jalan Raya Nagreg, Bandung, yang jasadnya dibuang ke sungai Serayu, Jawa Tengah, dihadirkan sebagai saksi di Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Selasa (15/3).

Kolonel Sus Wirdel Boy

mengatakan, kehadiran kedua pihak orangtua korban tersebut untuk menguatkan unsur dakwaan yang disangkakan kepada terdakwa.

Dua orang saksi yang kemarin muncul di TV dijadikan saksi, yaitu orangtu Salsabila dan orang tua Handi Saputra.

Guna memudahkan proses kedatangan kedua orang tua korban ke Jakarta, Oditur Militer Tinggi II Jakarta selaku Jaksa Penuntut Umum (JPU) dalam peradilan militer, menyiapkan pengamanan.

Oditur Militer Tinggi II Jakarta berkoordinasi dengan Komandan Polisi Militer (Dempom) Garut dan Polisi Militer (Puspom) Kodam III Siliwangi terkait pemberangkatan kedua orang tua korban ke Jakarta.

Tak hanya orang tua dari Handi dan Salsabila, pihaknya juga menghadirkan Kopda Andreas Dwi Atmoko dan Koptu Ahmad Soleh sebagai saksi di persidangan. "Orangtua Handi, Salsabila, serta kedua anak buah Priyanto termasuk dalam sembilan orang saksi yang dihadirkan Oditur Militer Tinggi II Jakarta pada persidangan," tuturnya. ● han



SIDANG PARIPURNA DPD

Wakil Ketua DPD Nono Sampono (kanan) menyaksikan Wakil Ketua DPD Mahyudin (tengah) menerima laporan kegiatan dari anggota DPD daerah pemilihan Sulawesi Barat Andri Prayoga Putra Singkarru (kiri) saat Rapat Paripurna DPD ke-9 di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (15/3). Rapat Paripurna tersebut beragendakan pembukaan masa sidang IV DPD tahun sidang 2021-2022, pidato pembukaan masa sidang IV DPD tahun sidang 2021-2022 dan laporan kegiatan anggota DPD di daerah pemilihan.

FOTO: ANT

PENGUMUMAN

Dengan Akta Pembubaran Persekutuan Komanditer "CV. AT-TARBIYAH BANGUN BERSAMA", tertanggal 02-03-2022 Nomor : 04 yang dibuat dihadapan SITI MASNUROH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, maka CV. AT-TARBIYAH BANGUN BERSAMA, berkedudukan di Jakarta Utara, telah dibubarkan. Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Jakarta, 16 Maret 2022
CV. AT-TARBIYAH BANGUN BERSAMA

PENGUMUMAN

Dengan Akta Pembubaran Persekutuan Komanditer "CV. CIPTA ABADI BAROKAH", tertanggal 02-03-2022 Nomor : 03 yang dibuat dihadapan SITI MASNUROH, Sarjana Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris di Kota Administrasi Jakarta Utara, maka CV. CIPTA ABADI BAROKAH, berkedudukan di Jakarta Utara, telah dibubarkan. Demikian pengumuman ini dibuat untuk diketahui.

Jakarta, 16 Maret 2022
CV. CIPTA ABADI BAROKAH

PENGUMUMAN

Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa PT. Yahanima Persada (Perseroan) berkedudukan di Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat akan meningkatkan modal dasar, modal ditempatkan dan disetor Perseroan, dan penyerahan atas peningkatan modal ditempatkan dan disetor Perseroan tersebut akan dilakukan dengan cara mengkonversi hutang Perseroan kepada pemegang saham menjadi saham Perseroan dengan cara pengalihan saham baru sejumlah 400.000 lembar saham dengan nilai nominal Rp.100.000,- per lembar saham; Pengumuman ini dibuat guna memenuhi ketentuan Pasal 6 PP No.15 tahun 1999.

Jakarta, 16 Maret 2022
Direksi
PT. Yahanima Persada